

# **Peran ASEAN dalam Mengatasi Masalah Human Security pada Kasus Terorisme**

Muhammad Zulfikar

## **Latar Belakang**

ASEAN (*Association of South East Asian Nations*/Perserikatan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 sejak ditandatanganinya Deklarasi Bangkok oleh lima negara pendirinya yaitu Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Saat ini ASEAN sebagai organisasi regional memiliki dan mewadahi sepuluh negara anggotanya dalam beragam kerjasama yang dilakukan dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, teknologi, sosial budaya, dan lain-lain. Hubungan kerjasama bilateral dan multilateral tersebut dilakukan demi tercapainya tujuan dibentuknya ASEAN yaitu mempercepat perkembangan ekonomi dan sosial, terciptanya kejayaan, serta meningkatkan stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara.

Selain karena persamaan letak geografis dan adanya rasa saling membutuhkan, kondisi Asia Tenggara sebelum dibentuknya ASEAN pada 1960-an yang rawan akan konflik juga menjadi alasan didirikannya ASEAN sebagai sarana dan upaya untuk menyatukan dan menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara. Masalah dan konflik yang terjadi seperti perang saudara yang terjadi di Vietnam disebabkan karena Asia Tenggara pada masa *Cold War* atau Perang dingin menjadi lokasi bagi Blok Timur (Uni Soviet) dan Blok Barat (Amerika Serikat) untuk kepentingan dan persaingan ideologi mereka. Setelah berakhirnya Perang Dingin, banyak konflik yang terjadi yang merupakan masalah tradisional mengalami pergeseran menjadi masalah yang lebih mengarah kepada kemanusiaan dalam bidang yang luas seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep keamanan tradisional yang sebelumnya fokus mengenai permasalahan negara seperti politik dan militer juga mengalami pergeseran ke masalah yang berkaitan dengan keamanan manusia (*Human Security*). Konsep keamanan manusia berarti negara tidak lagi menjadi prioritas untuk diamankan, melainkan manusia sebagai individu.

Dengan berkembangnya konsep keamanan manusia, ASEAN memperluas dan memperkuat kerjasamanya tidak hanya mencakup bidang politik dan keamanan, tetapi juga ekonomi, sosial, dan budaya demi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara ASEAN. Kerja sama ASEAN mencakup upaya perlindungan HAM, pemberantasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, dan lain sebagainya. Kerjasama ASEAN juga tidak lagi terbatas pada pemerintah, tetapi melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, pemuda, dan sebagainya. Untuk menjaga solidaritas dan mengefektifkan kerja samanya, ASEAN memiliki prinsip-prinsip yang menjadi landasan, seperti saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan penyelesaian

sengketa secara damai. Meskipun menghadapi banyak tantangan, ASEAN terus berkembang dan berupaya mewujudkan visi integrasi kawasan yang lebih erat dan maju.

### ***Human Security: Teori dan Contoh***

Penderitaan yang ditimbulkan oleh konflik dan kekerasan yang berkepanjangan dalam bentuk perang atau bencana alam, kemiskinan yang berkepanjangan, atau merosotnya ekonomi dapat mengurangi prospek perdamaian, stabilitas, dan pembangunan jangka panjang. Masalah tersebut termasuk kedalam jenis ketidakamanan manusia, yang dapat menyebar dengan cepat, mempengaruhi dan menghancurkan kehidupan masyarakat, bahkan melintasi batas negara. (United Nations Trust Fund for Human Security, 2019). Konsep keamanan manusia merupakan konsep lanjutan dari studi keamanan tradisional, yang berhubungan dengan perlindungan negara dan warganya. Dalam metode keamanan manusia, manusia adalah subyek dari pendekatan, yang tujuan akhirnya adalah perlindungan masyarakat terhadap konflik tradisional (militer) dan konflik nontradisional seperti kemiskinan dan penyakit. *The United Nations Development Programme* atau Program Pembangunan PBB mengkategorikan keamanan manusia ke dalam tujuh bidang, yaitu keamanan di bidang ekonomi, kesehatan, politik, pangan, masyarakat, lingkungan, dan politik. Pendekatan keamanan manusia mencerminkan suatu paradigma terhadap keamanan nasional dan internasional yang menempatkan manusia dan hubungan sosial serta ekonomi mereka dalam pusat perhatian.

Di Asia Tenggara sendiri, konflik yang mengancam manusia semakin dipengaruhi oleh konflik internal daripada eksternal. Kasus ini meningkat dalam beberapa dekade terakhir, seperti konflik antara penduduk muslim (Moro) dengan pemerintah Filipina, dan konflik di Thailand yaitu memuncaknya gerakan separatis pada 1960 oleh penduduk muslim karena adanya kebijakan yang mendiskriminasi kaum muslim disana, dan masih banyak konflik mengerikan yang lainnya. Konflik-konflik historis tersebut merupakan tantangan serius yang mengancam keamanan manusia.

Salah satu konflik *Human Security* di Indonesia adalah peristiwa gerakan terorisme yang terjadi di Kuta, Bali 19 tahun silam. Peristiwa yang dianggap sebagai kasus terorisme terkelam dalam sejarah Indonesia tersebut terjadi pada 12 Oktober 2002, dimulai dari peledakan dua bom secara hampir bersamaan pada jam 23.05 WITA berlokasi di Paddy's Pub dan Sari Club, Jalan Legian, Kuta, Bali. Kemudian dilanjutkan dengan meledaknya bom ketiga di Renon pada 23.15 WITA. Rangkaian kejadian yang terorganisir tersebut memakan lebih dari 500 korban, 200 korban meninggal dan 300 lainnya luka-luka. Aksi tersebut diketahui merupakan upaya balas dendam yang dilakukan para teroris dikarenakan konflik di Poso dan Ambon yang menyebabkan banyak umat muslim yang terbunuh, sehingga para teroris memilih Bali sebagai sasaran karena mayoritas penduduknya nonmuslim dan menurut mereka Bali merupakan pusat maksiat.

Tantangan nyata bagi keamanan manusia di kawasan ini adalah bagaimana mengatasi konflik internal yang dapat mengancam stabilitas, perdamaian, dan pembangunan. Upaya pencegahan konflik dan perlindungan terhadap masyarakat rentan menjadi fokus penting dalam memperkuat pendekatan Human Security di Asia Tenggara. Selain itu, perlu dicatat bahwa ancaman terorisme juga merupakan faktor yang signifikan dalam merusak keamanan manusia. Kejadian serangan di Bali menjadi pengingat akan dampak merugikan yang dapat disebabkan oleh tindakan terorisme terhadap masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Grup teroris yang menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik atau ideologis dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan menghancurkan kehidupan manusia.

Pentingnya kerjasama antarnegara dalam mengatasi tantangan keamanan manusia juga perlu ditekankan. Konflik dan terorisme tidak mengenal batas negara, dan kerja sama regional dapat menjadi kunci untuk menghadapi ancaman bersama. Forum dan mekanisme regional seperti ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) memiliki peran penting dalam mempromosikan dialog, kerjasama keamanan, dan pertukaran informasi untuk menghadapi tantangan keamanan manusia di kawasan ini. Dalam menghadapi semua tantangan ini, penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta promosi inklusi sosial menjadi kunci dalam membangun fondasi yang kuat untuk keamanan manusia. Seiring dengan itu, pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap dinamika keamanan manusia di tingkat lokal, nasional, dan regional juga diperlukan untuk menyesuaikan strategi dan kebijakan yang relevan.

## **Upaya ASEAN**

Kasus terorisme bukan lagi menjadi masalah yang baru bagi Asia Tenggara, namun Asia Tenggara melalui ASEAN masih memiliki kesulitan dalam penanganannya. Hal tersebut menjadi sangat penting bagi ASEAN untuk membentuk kelompok-kelompok yang bergerak di bidang keamanan khususnya dalam mengatasi masalah terorisme. Kasus teror bom Bali menjadi salah satu hal yang mengundang tanggapan besar dari ASEAN terhadap terorisme dan radikalisme dengan menyatakan perang terhadap terorisme. ASEAN telah membentuk *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) pada 1997 yang khusus membahas konflik transnasional di Asia Tenggara. Kemudian implementasinya dilakukan dengan membentuk *ASEAN Political-Security Community* (APSC) sebagai komunitas pionir bagi ASEAN dalam menanggapi kasus terorisme di Asia Tenggara. Regulasi APSC menghasilkan beberapa komunitas kerjasama yaitu *Asean Convention on Counter Terrorism* (ACCT), dan *ASEAN Regional Forum* (ARF). ACCT adalah forum hukum dan dibentuk untuk meningkatkan kesadaran daerah tentang implikasi yang merugikan dari kejahatan transnasional terorisme. APSC melalui ACCT memiliki rencana dan aksi kerjasama penanganan terorisme seperti pengawasan, pertukaran informasi, dan rehabilitasi tersangka. Sedangkan ARF bertujuan untuk

mewadahi pertemuan dan kerjasama penanganan ASEAN atas isu keamanan baik tradisional maupun non-tradisional demi terciptanya suasana dan lingkungan yang damai dan kondusif di kawasan Asia Tenggara.

Respons ASEAN terhadap kasus teror bom Bali menjadi langkah signifikan dalam menanggapi ancaman terorisme dan radikalisme. ASEAN menyatakan perang terhadap terorisme dan berkomitmen untuk mengatasi tantangan ini melalui pembentukan berbagai kelompok kerja di bidang keamanan. Pada tahun 1997, ASEAN membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) yang secara khusus membahas konflik transnasional di Asia Tenggara. Implementasi dari AMMTC dilakukan dengan pembentukan ASEAN Political-Security Community (APSC) sebagai komunitas pionir ASEAN dalam menanggapi kasus terorisme di Asia Tenggara. APSC menghasilkan berbagai regulasi dan komunitas kerjasama, antara lain Asean Convention on Counter Terrorism (ACCT) dan ASEAN Regional Forum (ARF). ACCT berfungsi sebagai forum hukum yang dibentuk untuk meningkatkan kesadaran di wilayah tersebut mengenai implikasi merugikan dari kejahatan transnasional terorisme. APSC, melalui ACCT, telah merancang rencana dan aksi kerjasama penanganan terorisme, termasuk pengawasan, pertukaran informasi, dan rehabilitasi tersangka. Sementara itu, ARF bertujuan untuk menjadi wadah pertemuan dan kerjasama dalam menanggapi isu keamanan, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional, guna menciptakan suasana dan lingkungan yang damai serta kondusif di kawasan Asia Tenggara.

Melalui langkah-langkah ini, ASEAN berupaya secara aktif untuk meningkatkan kapasitas dan koordinasi antarnegara dalam menangani tantangan terorisme, serta memperkuat fondasi keamanan manusia di kawasan ini. Kendati masih terdapat hambatan dan kompleksitas, upaya ini mencerminkan kesadaran kolektif untuk mengatasi ancaman yang merugikan keamanan manusia dan stabilitas di Asia Tenggara.

## Referensi

United Nations Trust Fund for Human Security. (2019). *What is Human Security? – The Human Security Unit*. UN. <https://www.un.org/humansecurity/what-is-human-security/>

Aretha, Inge & Pemerintahan, Politik & Internasional, Hubungan. (2020). *PERAN AKTIF ASEAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGANI KASUS TERORISME DI KAWASAN ASIA*

Tempo.co. (n.d.). *Bom Bali 12 Oktober 2002 Tewaskan 202 Orang, Amrozi Mengaku sebagai Pelaku*. <https://nasional.tempo.co/read/1516501/bom-bali-12-oktober-2002-tewaskan-202-orang-amrozi-mengaku-sebagai-pelaku>